



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BERGERAK UNTUK REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

[ Pemerintahan **Digital** ]

27 November 2023

Percepatan Transformasi Digital Governement di Kalimantan

**Haji Munawwarah.,S.H**

Analisis Kebijakan Muda

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Penerapan SPBE



**panrb**

KEMENTERIAN  
PEHDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**



**1.**

Birokrasi yang  
**Berdampak**



**2.**

Reformasi Birokrasi  
**Bukan Tumpukan  
Kertas**



**3.**

Birokrasi **Lincih  
dan Cepat**

(Ditopang Pemerintah Digital Berbasis Data)

### Masalah Negara



## REFORMASI BIROKRASI (ENGINES for DEVELOPMENT)

Perbaikan tumpang tindih kebijakan	Sistem Merit
Penyederhanaan proses bisnis	Perampingan struktur organisasi
Manajemen kinerja	Pengawasan
Pembagian kewenangan	Peningkatan kapasitas SDM
Relasi antar aktor	Peningkatan layanan pemerintah

Penting untuk memilih **sektor/isu (prioritas)** yang akan mempercepat aksi di sektor lain dan memberikan **momentum** perubahan

*(World Bank, 2016; United Nation, 1997)*



### Tujuan dan Target Pembangunan

### REFORMASI BIROKRASI TEMATIK (SPECIFIC ENGINES for DEVELOPMENT)

*Sectoral & Cross-sectoral approach*



# PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

## RB PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Tata Kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada penurunan kemiskinan.

Cara kerja kolaboratif dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan.

## RB PENINGKATAN INVESTASI



Reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan *competitiveness index*, untuk melipat gandakan investasi.

Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda.

## RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN



Penguatan tata kelola birokrasi merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat.

Contoh: Penanganan inflasi, belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.



## RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Digitalisasi berbasis Arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat.



# PERAN SPBE SEBAGAI ENABLER TRANSFORMASI DIGITAL



panrb

KEMENTERIAN PENYAYANGAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah **penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.**

## Tujuan SPBE



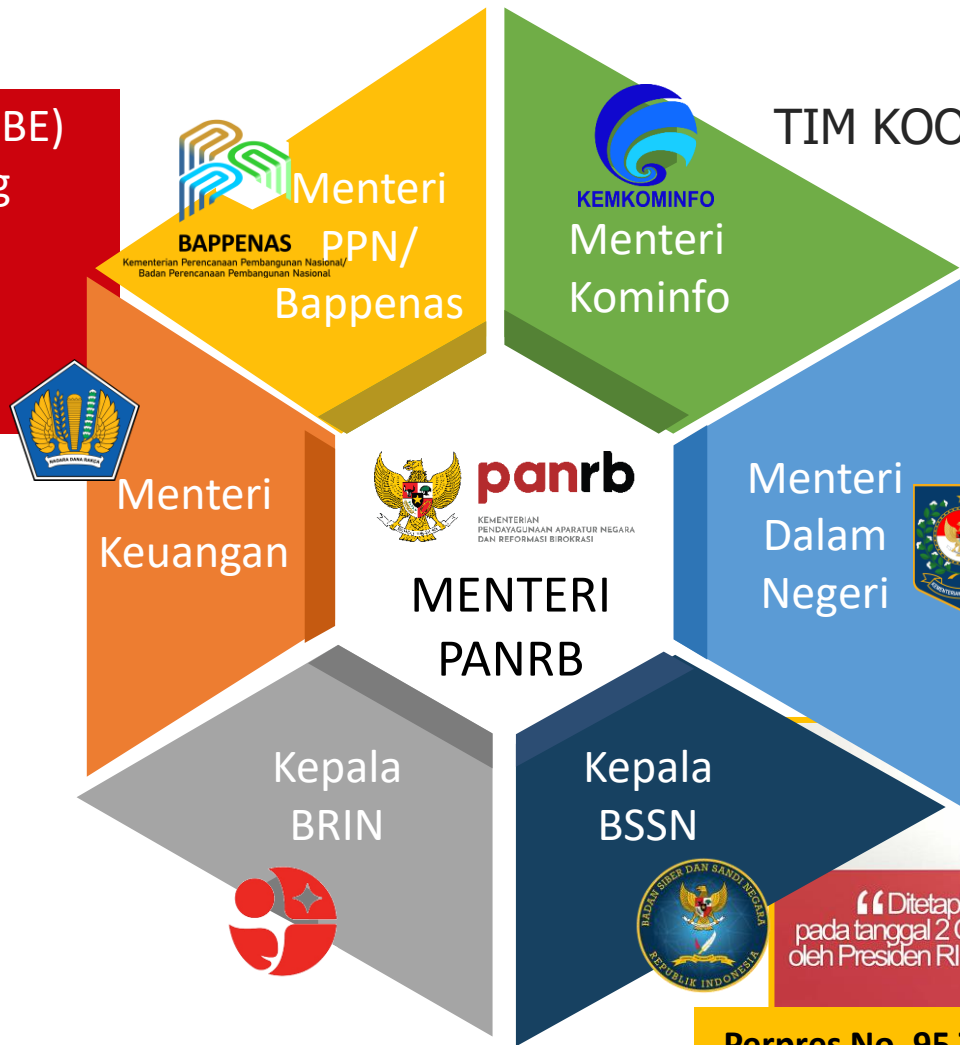
Mewujudkan **tata Kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel



Mewujudkan **pelayanan publik** yang berkualitas dan terpercaya



Meningkatkan **keterpaduan** dan efisiensi penyelenggaraan SPBE



## TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

*(Pasal 59 ayat (3) Perpres 95/2018 tentang SPBE)*

“Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018, oleh Presiden RI Joko Widodo”  
**Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE**





# URGENSI PENYELENGGARAAN SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)



## Memudahkan Warga Mengakses Layanan Publik

Terdapat **± 27.000 Aplikasi**: Warga harus bikin banyak akun dan isi banyak data untuk akses layanan publik.



## Menaikkan Indeks Persepsi Korupsi, Tingkat Kemudahan Berbisnis, & Indeks Penegakan Hukum

SPBE yang baik akan mampu mengerek berbagai indikator penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif.



# SPBE TIDAK HARUS MENAMBAH APLIKASI

Perlu dihindari:

**Satu Inovasi,  
Satu Aplikasi**



**PELAYANAN EKSTERNAL:**  
Warga tidak harus download begitu banyak aplikasi, bikin begitu banyak akun, isi berulang begitu banyak data.



**PELAYANAN INTERNAL:**  
Integrasi/interoperabilitas antar-sistem di lingkup pemerintahan.

# KERANGKA KERJA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018



## TATA KELOLA SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu



## MANAJEMEN SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkelanjutan



## PENYELENGGARA SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



## LAYANAN SPBE

- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (G2G/G2E)
- Layanan Publik Berbasis Elektronik (G2B/G2C)





panrb

KEMENTERIAN  
PENYANGGUKAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# PERATURAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2022 TENTANG ARSITEKTUR SPBE NASIONAL



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

**Mengingat** :  
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Arsitektur . . .

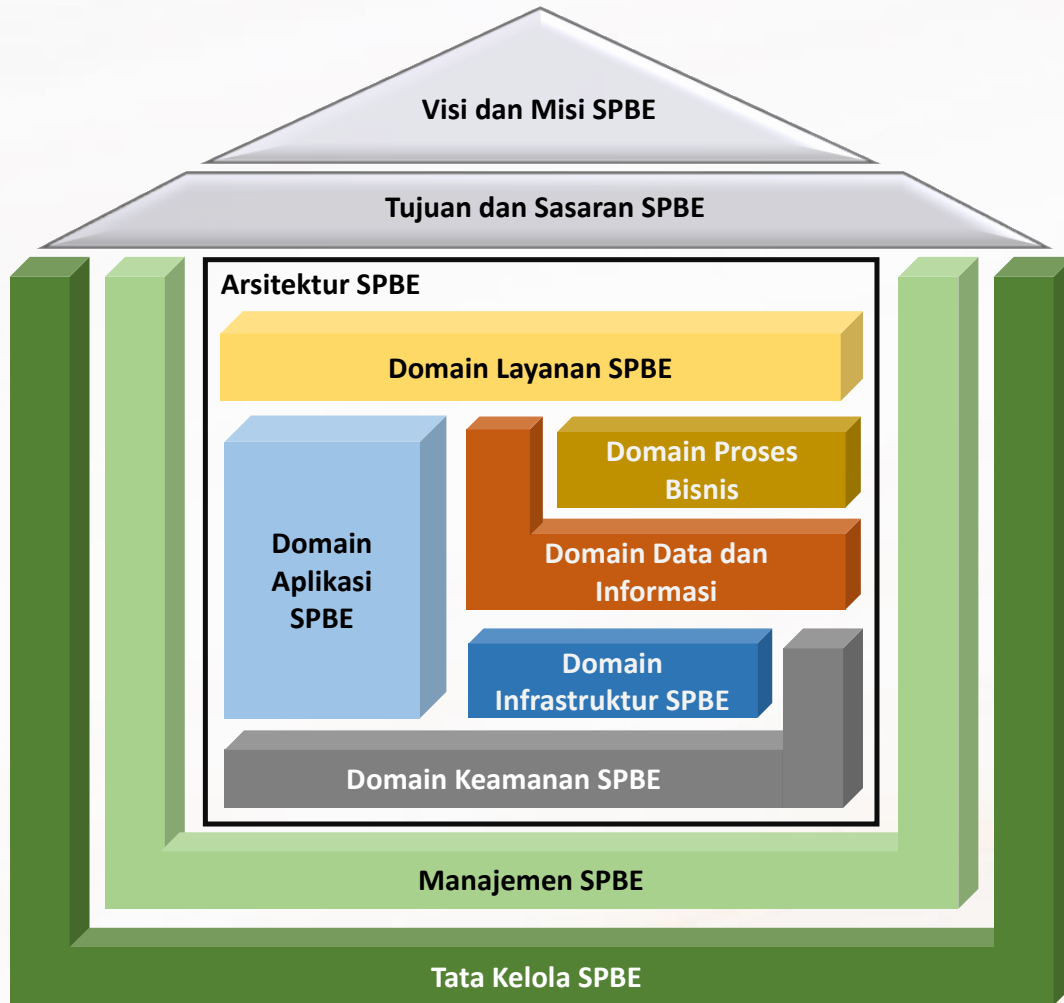
SK No 158198 A



## Perpres Arsitektur SPBE Nasional Telah Ditandatangani **Bapak Presiden Joko Widodo**

### Bukti komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data & informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE & keamanan SPBE untuk pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayanan publik

# ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

## DEFINISI

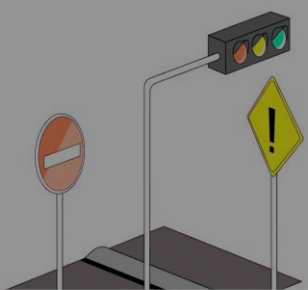
Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

## JANGKA WAKTU

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

## TERDIRI DARI

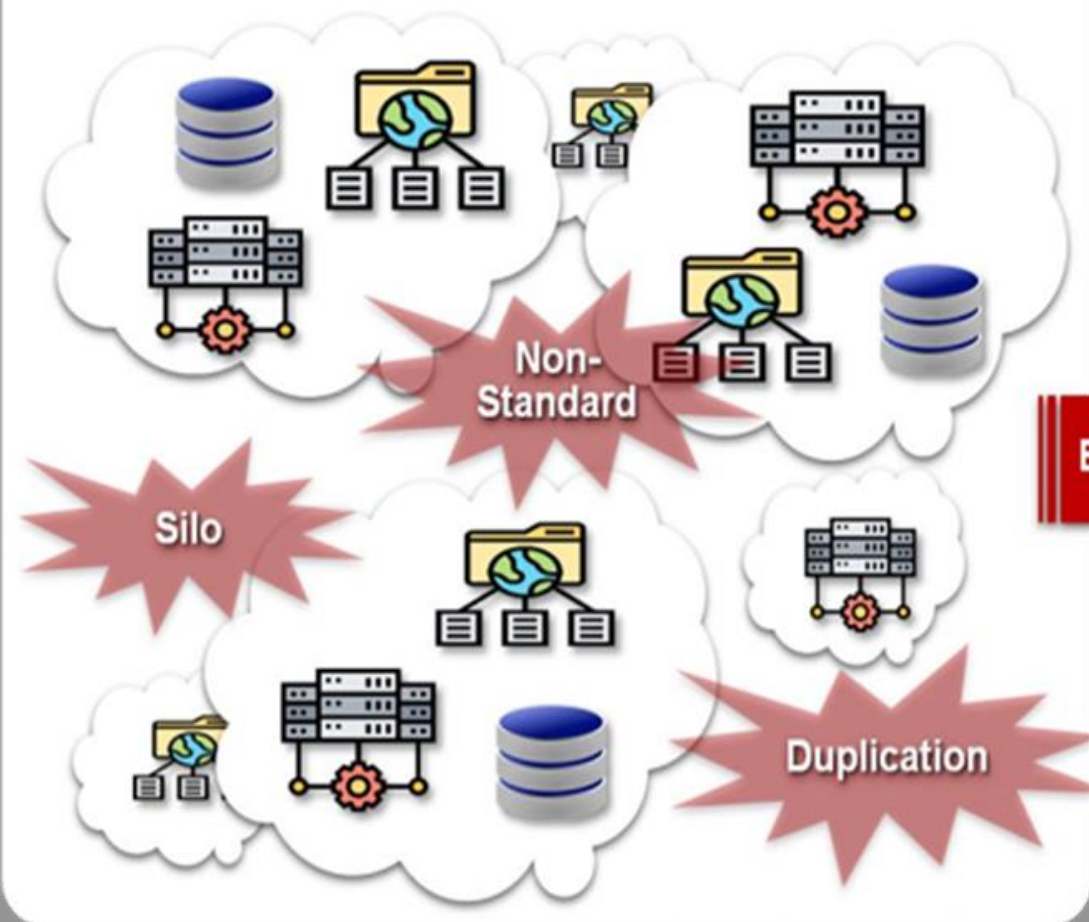
- Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah



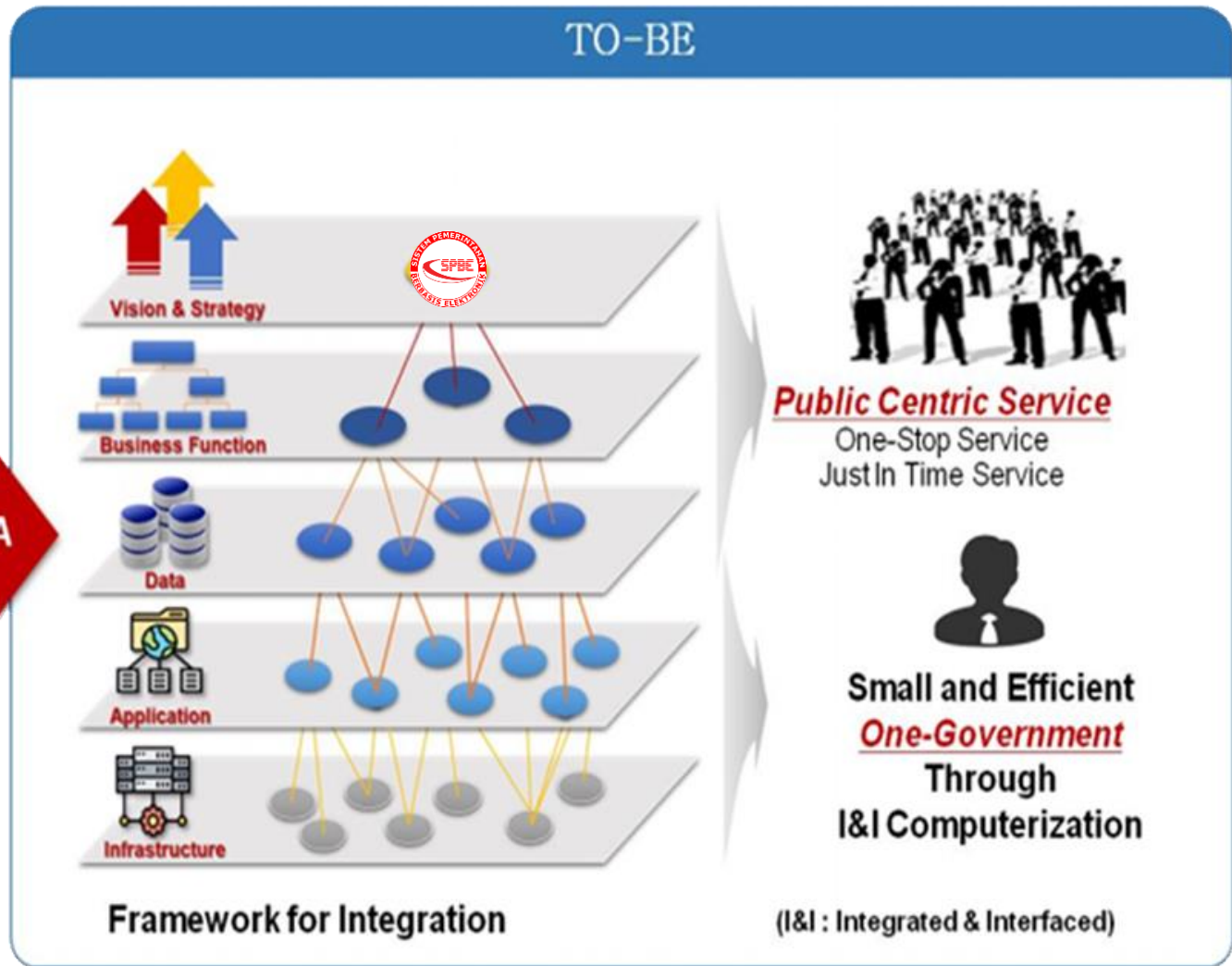
TANPA

# DENGAN ARSITEKTUR SPBE ●●●

AS-IS



TO-BE



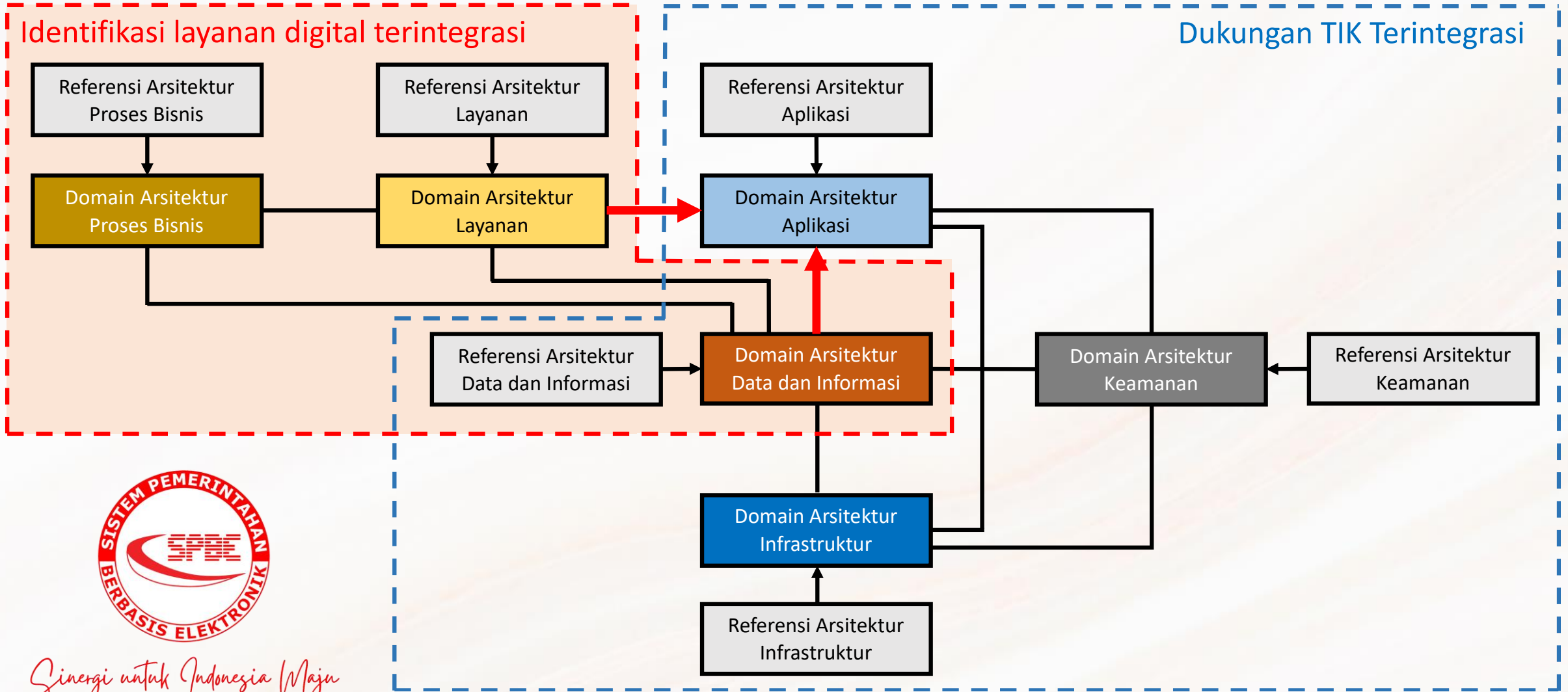
**Public Centric Service**  
One-Stop Service  
Just In Time Service

**Small and Efficient  
One-Government  
Through  
I&I Computerization**

(I&I : Integrated & Interfaced)



# KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

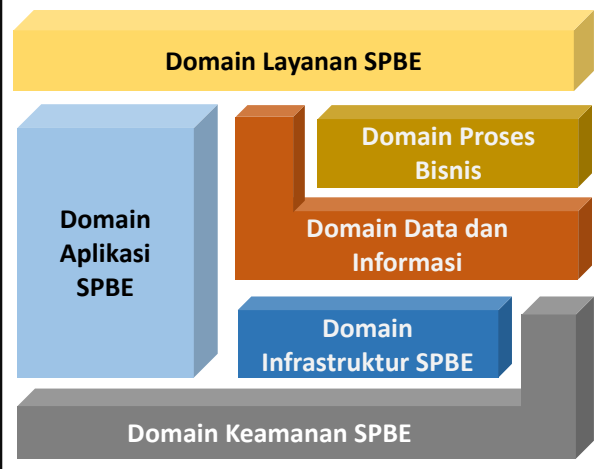


*Sinergi untuk Indonesia Maju*

1

## ARSITEKTUR SPBE (AS-IS)

Arsitektur SPBE



## Gap Analysis

### PETA RENCANA SPBE

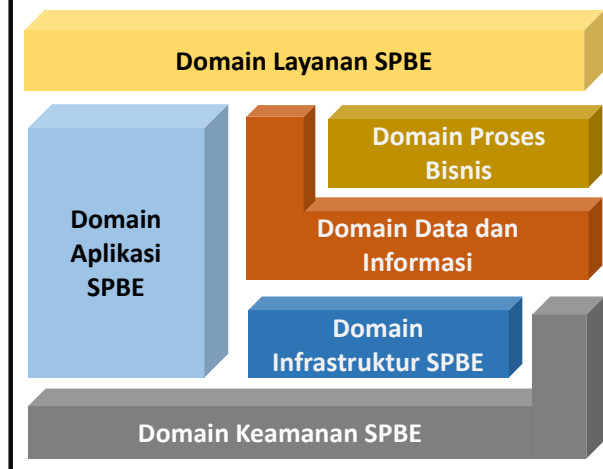
No	Project/Activities	UIC	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)</b>					
Indikator	(Indikator)		(Target)	(Target)	
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)</b>					
<b>1 Tata Kelola</b>					
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
B (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
...					
<b>2 Manajemen</b>					
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
...					
<b>3 Layanan</b>					
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
...					
<b>4 Aplikasi</b>					
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
...					
<b>5 Infrastruktur</b>					
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
...					
<b>6 Keamanan</b>					
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
...					
<b>7 Audit TIK</b>					
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
- (Kegiatan)					
- (Kegiatan)					
...					
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)</b>					
<b>1 Tata Kelola</b>					
...					
<b>7 Audit TIK</b>					
...					

3

2

## ARSITEKTUR SPBE (TO-BE)

Arsitektur SPBE



# INDONESIA 2045 at a Glance



## Indonesia 2045

Berdaulat, Maju,  
Adil, dan Makmur



### Indonesia Menuju Negara Pendapatan Tinggi & Salah Satu PDB Terbesar Dunia <sup>[1 & 2]</sup>

- Ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7%/tahun (thn 2016-2045)
- Menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036
- PDB terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045 & ke-4 terbesar pada tahun 2050 setelah RRT, India, & AS
- 70% penduduk Indonesia (223 Juta) pada tahun 2045 tergolong kelas pendapatan menengah



### Peningkatan Ekonomi Digital <sup>[3]</sup>

- Peningkatan aktivitas ekonomi digital dengan proyeksi mencapai sekitar Rp22.500 triliun tahun 2045.
- Proyeksi meningkatnya kontribusi sektor TIK terhadap PDB tahun 2045 sebesar 20,7%



### Bonus Demografi <sup>[2]</sup>

Dari 318,9 juta jiwa pada 2045, angka ketergantungan penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 53,35% (100 penduduk usia produktif menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif) – Digital Talent



### Pemanfaatan Teknologi bagi Pembangunan Nasional <sup>[2 & 4]</sup>

Beberapa perkembangan teknologi ke depan: perdagangan elektronik, blockchain, AI, big data, IoT, high-speed connectivity (6G), Virtual Reality (VR), verifikasi transaksi keuangan real-time, dsb.

Sumber:

- [1] The Long View How will the global economic order change by 2050?, PwC, 2017
- [2] Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, Kemen PPN/Bappenas, 2019
- [3] Buku Induk Pengembangan Industri Digital 2023-2045, Kemen PPN/Bappenas, 2022
- [4] Visi Indonesia Digital 2045, Kemenkominfo, 2023





panrb

KEMENTERIAN PENYANGGULANGAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

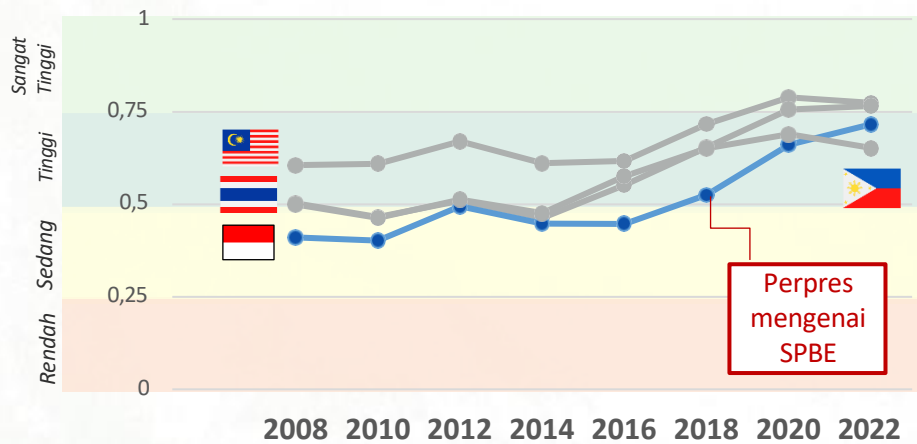
# Perbaikan layanan digital pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan E-Government Indonesia



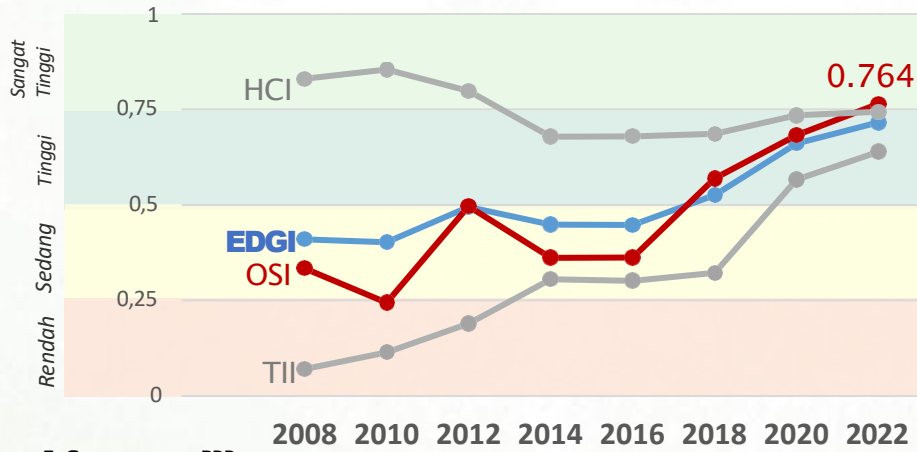
\*EGDI memiliki 3 komponen: HCI (SDM), TII (Infrastruktur), & OSI (Layanan)

Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki **potensi untuk meningkatkan Online Service Index**, terutama dalam aspek **Penyediaan Layanan dan Teknologi**

Skor EDGI Indonesia terus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara tetangga setelah diterbitkannya peraturan dasar tentang SPBE...



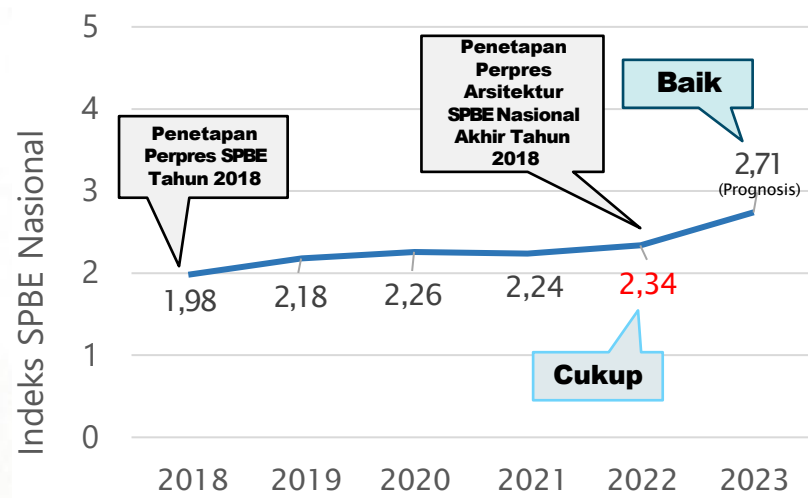
Tetapi peningkatannya tidak impresif untuk mencapai tingkat "Very-High". Fokus perbaikan layanan (diukur dengan OSI yang telah mencapai tingkat "Very-High") dapat menjadi lokomotif pengungkit.



Sumber: E-Government PBB

Negara	Skor OSI	Penyediaan Layanan	Partisipasi Digital	Teknologi	Kerangka Kerja Kelembagaan	Konten
	1.000	0.973	0.977	0.977	1.000	1.000
	1.000	0.920	0.973	0.882	1.000	0.800
	0.764	<b>0.693</b>	0.715	<b>0.647</b>	1.000	1.000

Melalui penerapan **Arsitektur SPBE Nasional** (Penetapan Perpres di akhir tahun 2022), meningkatkan capaian evaluasi penerapan SPBE di seluruh Instansi Pemerintah, pada tahun 2022 Indeks SPBE Nasional memperoleh predikat "Cukup" **naik predikat menjadi "Baik"** pada tahun 2023.



"Peran besar penetapan **Arsitektur SPBE Nasional** untuk penerapan keterpaduan SPBE, dalam peningkatan Indeks SPBE Nasional"

Rentang Indeks	Predikat SPBE
4,2 - 5,0	Memuaskan
3,6 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
<1,8	Kurang

# ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI AKSELERASI INTEGRASI LAYANAN DIGITAL DI DAERAH

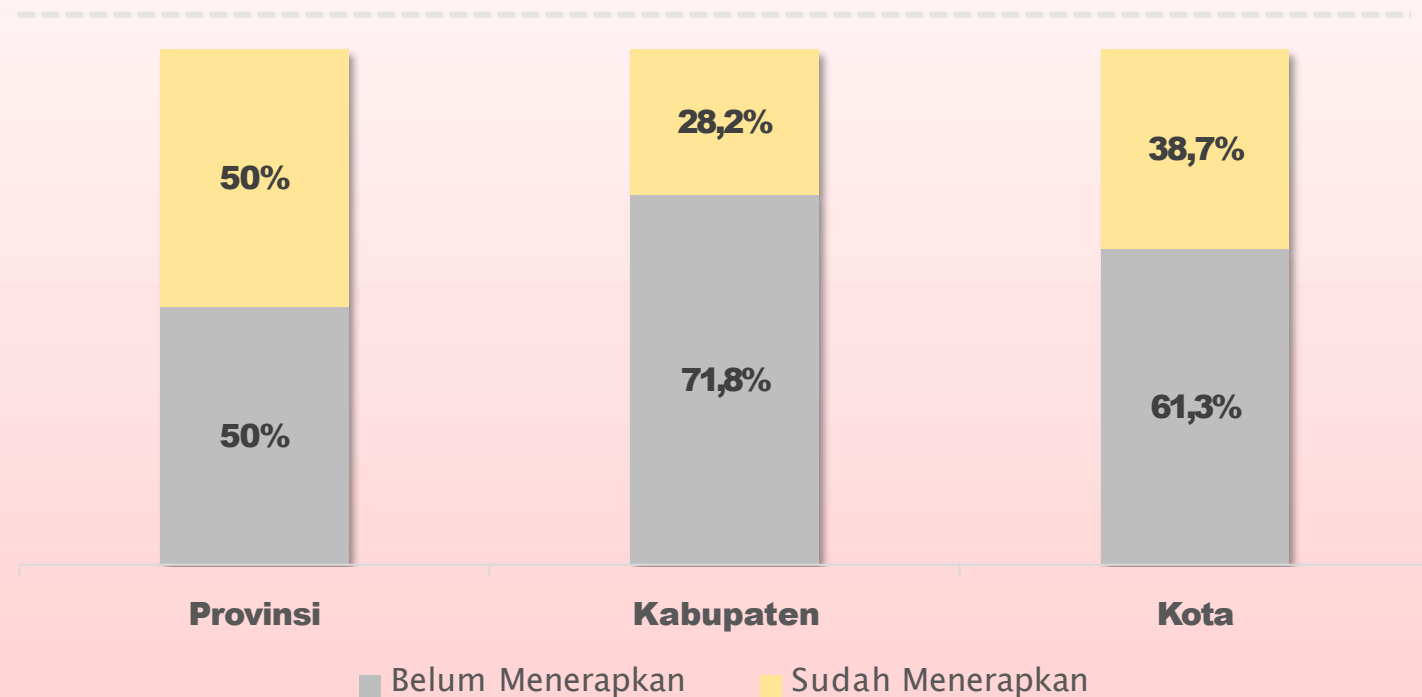


## MANFAAT

- ✓ Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis pemerintahan
- ✓ Menerapkan **standardisasi TIK & standardisasi kualitas layanan** digital nasional
- ✓ Memudahkan **integrasi layanan** pemerintah, melalui mekanisme **interoperabilitas**, sehingga menumbuh-kembangkan inovasi proses bisnis & layanan baru
- ✓ Berbagi **data & informasi** sesuai kebijakan Satu Data Indonesia
- ✓ Menghilangkan **duplikasi aplikasi & infrastruktur TIK**, serta memperkuat Keamanan Informasi
- ✓ Meningkatkan **keselarasan perencanaan & penganggaran SPBE**, sehingga meningkatkan efisiensi & efektivitas penerapan SPBE

## Penerapan Arsitektur SPBE di Pemda

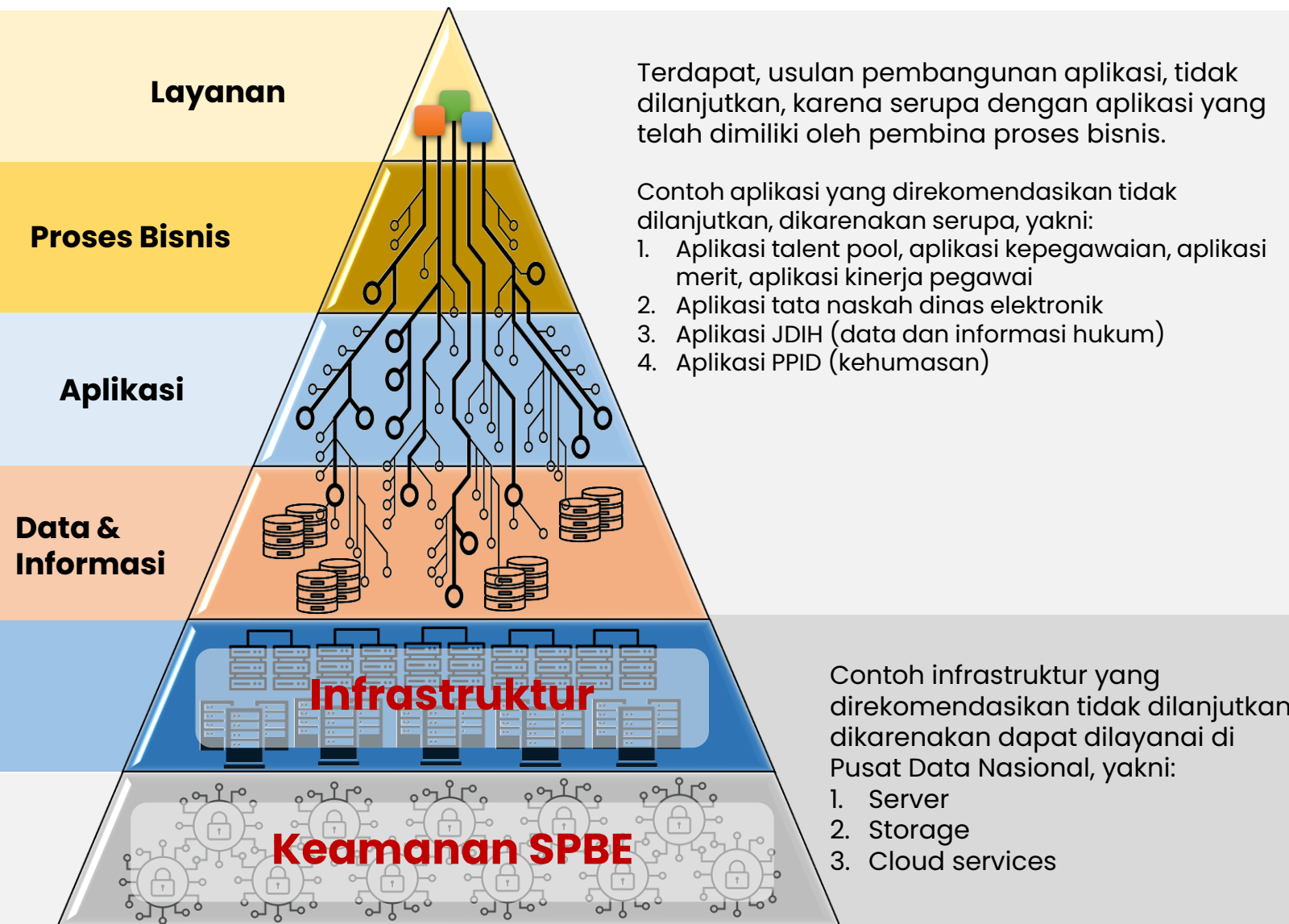
Sebanyak **172 (31,5%) Pemda** sudah menerapkan Arsitektur SPBE, perlu dukungan 374 (68,5%) Pemda lainnya



Per 27 Oktober 2023

# Clearance Belanja TIK

## Memastikan efektivitas belanja TIK untuk menjamin keselarasan penggunaan anggaran TIK dengan Arsitektur SPBE (*Whole Govt*)



## Clearance Belanja TIK di Pemerintah Pusat

Dilaksanakan atas kolaborasi Tim Nasional Koordinasi SPBE (Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu) | Sejak 2019



Total usulan belanja SPBE

IDR 6,788 triliun

- IDR 3,113 triliun belanja aplikasi
- IDR 3,687 triliun belanja infrastruktur TIK



49 institusi



**Penghematan**

IDR 310 miliar (USD 20,3 juta)

Juni, 2023

Potensi penghematan diprediksi meningkat seiring dengan perluasan cakupan dan lokus mekanisme *clearance*





# Indonesia Saat Ini dan **Best Practice**

Diperlukan terobosan agar Indonesia dapat mewujudkan potensi Pemerintah Digital secara maksimal

## FOKUS

Perlu adanya **entitas khusus dan sentral** untuk memimpin masing-masing:  
**a. strategi dan kebijakan**  
**b. pengembangan dan implementasi**

Perlu ditentukan bahwa hanya ada **1portal** untuk seluruh layanan publik, berbasis identitas digital

Indonesia perlu **fokus ke DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI)** sebagai dasar dimana layanan lain akan dibangun

- **Political Will**
- **Kepemimpinan digital**
- **Rekrutmen talenta**
- **Prioritas ke DPI**
- **Sentralisasi lembaga**
- **Fokus Pengguna**



## INDONESIA



## BEST PRACTICE

### KELEMBAGAAN

- Strategi dan Kebijakan oleh **Tim Koordinasi SPBE Nasional (7 Instansi) Kementerian Koordinator**
- **Tidak ada institusi/lembaga khusus** untuk pengembangan dan implementasi layanan digital nasional (pembangunan sektoral) - **Sedang disiapkan penugasan ke Perum Peruri sebagai pilot di area Pemerintahan Digital**

- **Lembaga khusus dan sentral** untuk memimpin strategi dan kebijakan
- **Lembaga khusus dan sentral** untuk eksekusi pengembangan dan implementasi strategis (GovTech Pemerintah)

# [GovTech]

### LAYANAN DIGITAL UTAMA

- **Terpisah dan tidak terintegrasi** (bersifat sektoral dan *government centric*)
- **Direncanakan** akan ada Portal Pelayanan Publik Nasional dan Super-App dengan beberapa layanan sebagai pilot, **berbasis Arsitektur SPBE Nasional**

- **Layanan terpadu secara nasional** (lintas sektor dan citizen centric)
- **1Portal** dan/atau **app utama pemerintah** dengan **layanan publik terintegrasi, berbasis identitas digital nasional** sehingga membutuhkan **hanya satu akun (single sign-on)** untuk seluruh layanan

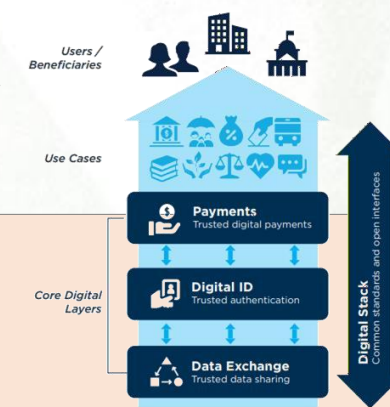
### SISTEM UTAMA

- Database NIK masih **terbatas pada fungsi verifikasi dan validasi identitas**
- Sebatas portal data terpadu, **belum ada kapabilitas sebagai platform pertukaran data nasional**
- Sudah ada sistem Kemenkeu (MPN) dan BI (QRIS, BI-FAST), serta rencana pengembangan sistem transaksi keuangan negara kepada masyarakat (*Government to Person/G2P*), **namun belum terkonsolidasi**

- **3 sistem utama dikelola pemerintah sebagai dasar pemerintahan digital (Digital Public Infrastructure Framework)**
  1. Identitas digital nasional
  2. Platform pertukaran data
  3. Pembayaran digital

### FAKTOR SUKSES KUNCI

- **Kemauan dan dukungan politik**
- **Kepemimpinan digital**
- Fokus ke pengguna (*Citizen Centric*)
- Penguatan/**sentralisasi tata kelola** dan kelembagaan
- Rekrutmen **talenta digital terbaik** ke pemerintahan
- Prioritisasi **Digital Public Infrastructure** dan **interoperabilitas sistem eksisting**



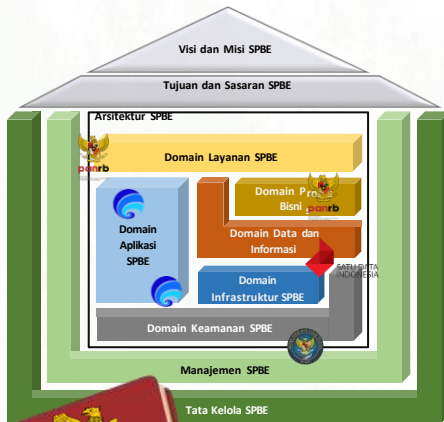


# TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH

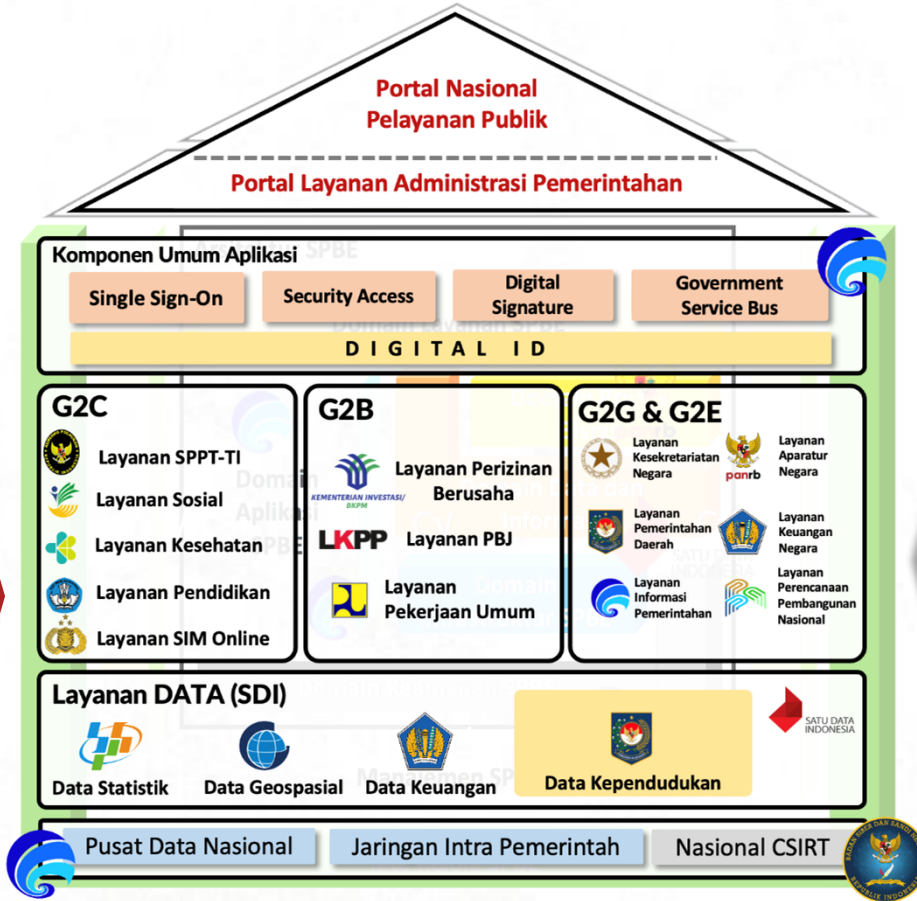
## PENERAPAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DIGITAL (DPI)



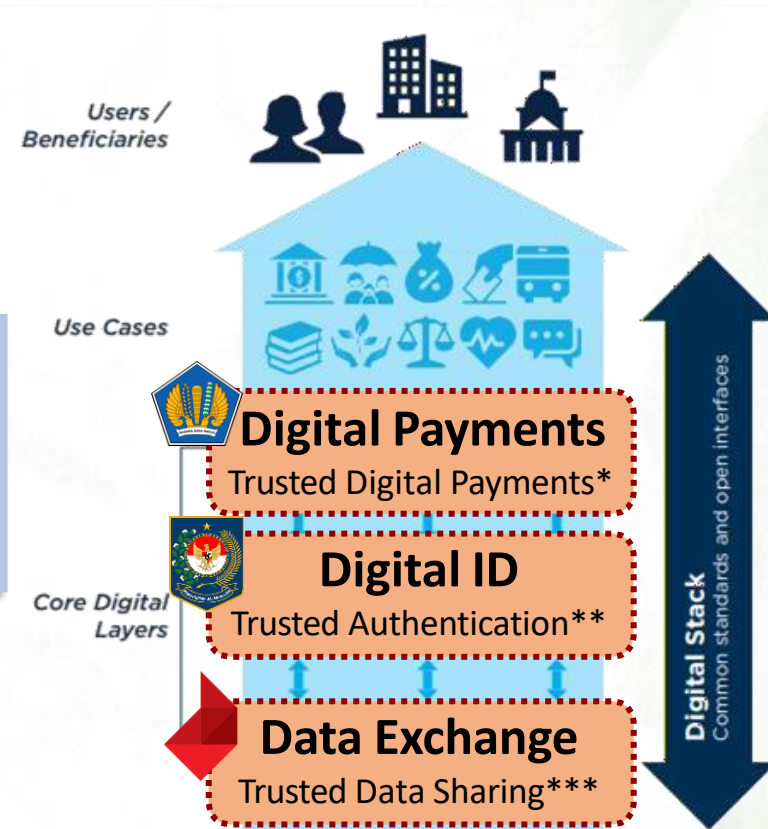
Arsitektur SPBE Nasional berfokus kepada penerapan **DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI)**, yang saat ini sudah diakui di dunia sebagai kunci akselerasi transformasi digital yang berdampak luas ke pembangunan ekonomi. Saat ini sudah ada **UN Charter** khusus untuk DPI, dalam rangka mendorong adopsi DPI di seluruh dunia.



Inisiatif Strategis 2024



### Digital Public Infrastructure (DPI)



\***Ekosistem transaksi keuangan nasional**, mengintegrasikan berbagai inisiatif *digital payment* nasional (Kemenkeu, Bank Indonesia)

\*\***Ekosistem identitas digital nasional**, mengkonsolidasikan berbagai identitas menjadi identitas digital nasional, dengan data kependudukan sebagai (Foundation-ID)

\*\*\***Ekosistem pertukaran data nasional**, pertukaran data elektronik untuk mendukung penyelenggaraan layanan digital nasional



panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH INDONESIA TERUS BERKEMBANG, NAMUN RPERPRES YANG BARU AKAN MENJADI KUNCI PERCEPATAN

Pondasi kebijakan telah diterbitkan...



## Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menetapkan prinsip, tata kelola, komponen, dan inisiatif-inisiatif utama (Perpres 95 Tahun 2018)

## Perpres tentang Arsitektur

Arsitektur tata Kelola pemerintahan digital lintas sektor untuk keterpaduan layanan digital nasional (Perpres 132 Tahun 2022)

## Perpres Satu Data Indonesia

Menetapkan prinsip, tata kelola, dan manajemen data dan informasi pemerintah (Perpres 39 Tahun 2019)

## UU Pelindungan Data Pribadi

Menetapkan pedoman, proses, dan standar untuk implementasi Pelindungan Data Pribadi (UU 27 Tahun 2022)

Pondasi tata kelola telah ditetapkan...

- **Tim Koordinasi SPBE Nasional** untuk memimpin pengembangan kebijakan dan koordinasi penerapan pemerintah digital
- **Arsitektur SPBE Nasional** untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai inisiatif strategis digitalisasi pemerintah

...telah ada beberapa capaian...

- **Berbagai inisiatif utama** telah diluncurkan, sebagai contoh : MPP Digital, Portal Satu Data, e-Purchasing, e-Catalog
- **Unit-unit digital khusus juga telah dibentuk**, misalnya Kemendikbud-Govtech Edu, Kemenkes DTO

...namun masih ada tantangan

- Kemampuan **pengembangan dan implementasi yang tidak merata** di antara Kementerian / Lembaga
- **Integrasi dan interoperabilitas** tetap sulit terlaksana
- Kebutuhan **pelindungan data pribadi**

Perpres Percepatan Transformasi Digital dapat **mengakselerasi kemajuan** dengan menjawab tantangan eksisting



**Memperkuat tata kelola** melalui keterlibatan Kementerian Koordinator, target pelaksanaan, dan berbagai penguatan lain



Membangun **kemampuan pengembangan dan implementasi Pemerintah** melalui penugasan BUMN (Sebagai GovTech Pemerintah)



Mempercepat **pembangunan layanan digital prioritas** dan menekankan **integrasi dan interoperabilitas** dengan berfokus pada **Infrastruktur Publik Digital / DPI\*\***

\*Perpres = Peraturan Presiden

\*\*DPI = *Digital Public Infrastructure* tidak merujuk kepada konektivitas internet, melainkan merupakan sekumpulan solusi dan sistem yang memungkinkan tersedianya berbagai fungsi dan layanan penting di seluruh masyarakat secara efektif baik di sektor publik dan swasta (*Digital Public Goods Alliance, 2021*)





# FOKUS PADA APLIKASI PRIORITAS DAN PERAMPINGAN APLIKASI EKSISTING, ADALAH KUNCI UNTUK MEMPERCEPAT KEMAJUAN

panrb

KEMENTERIAN PENYEDIAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

## Pemerintah yang proaktif dan terpersonalisasi

Dengan transformasi dan digitalisasi yang menyeluruh, pemerintah akan mampu melakukan berbagai misi pembangunan dan pelayanan ke masyarakat yang tertarget dan tepat pada waktunya (*just-in-time*). **Pemerintah hadir secara proaktif tanpa warga harus meminta, terpersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing, dan pada waktu yang tepat, menjadikan digitalisasi sebagai “Jalan Tol Pelayanan Publik” menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Bapak Presiden**

1

### Fokus pada layanan dasar melalui aplikasi prioritas\* sebagai pondasi

Pergeseran paradigma dari alokasi sumber daya yang tersebar menjadi **berfokus kepada sistem yang fundamental dan memiliki dampak besar.**

2

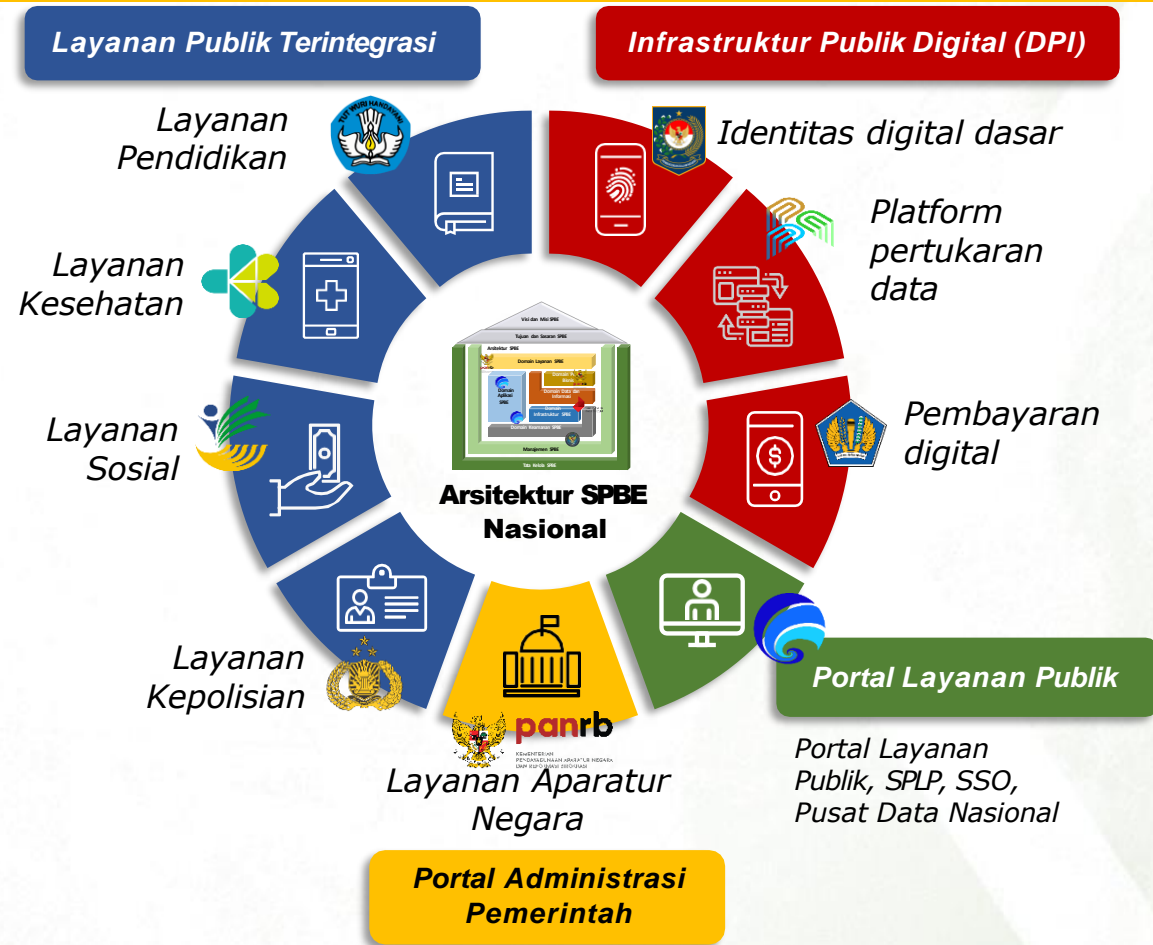
### Merampingkan sistem atau aplikasi eksisting menuju integrasi layanan digital

**Transformasi dan pengakhiran sistem yang bersifat duplikasi aplikasi,** kurang maksimal, dan/atau tidak optimal diakses, untuk menyelaraskan layanan, **menjadi layanan digital pemerintah terpadu.**

3

### Pengembangan dan implementasi yang terpusat\*\* oleh BUMN Perum

Memastikan arah produk selaras dan kualitas teknis terstandarisasi untuk aplikasi prioritas, sekaligus secara sistematis **mendorong integrasi dan interoperabilitas, dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna (Citizen Centric)**



(Dukungan digitalisasi pemerintah di IKN)

\* Aplikasi prioritas dengan kriteria memiliki pengguna lebih dari 200K

\*\* Pengembangan aplikasi non-prioritas/strategis selain yang diamanatkan dalam Perpres, **dibuka untuk partisipasi sektor swasta/mekanisme lainnya.**



# RPERPRES SEDANG MENUNGGU DITANDATANGANI PRESIDEN SEBAGAI PONDASI UNTUK PENINGKATAN LAYANAN PEMERINTAH DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN NASIONAL

**panrb NASIONAL**

KEMENTERIAN PENYANGGULANGAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



### Dampak

- Birokrasi yang Efisien dan Efektif
- Peningkatan IPM\* dan Standar Hidup
- Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

\*Indeks Pembangunan Manusia

- Kemampuan Implementasi
- Fokus & Integrasi
- Penguatan Tata Kelola

Peninjauan dan Perbaikan Berkala (termasuk tata kelola institusi)

**Perpres\* untuk Percepatan Transformasi Digital**

\*Proses penetapan Rancangan Perpres, sesuai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden (12 Juni 2023)



### Kisah Sukses

**India**

**Mempercepat 40 tahun pembangunan**, dicapai dalam 7 tahun dari proyeksi 47 tahun<sup>1</sup>

Inklusi keuangan untuk 80% populasi dalam 6 tahun, dibandingkan dengan proyeksi 46 tahun<sup>2</sup>

**Penerapan Aadhaar (ID), UPI (Payment), dan DEPA (Data Exchange)**

**Estonia**

**Menghemat 2% dari PDB tahunan** karena registrasi dan administrasi yang efektif<sup>3</sup>

Pertumbuhan PDB per kapita 10x lipat dalam 20 tahun<sup>4</sup>

**Penerapan X-Road** pertukaran data pemerintah untuk penyelenggaraan layanan digital terpadu

**Tiongkok**

**Penurunan kemiskinan eksponensial** periode 2015–2019 (5 tahun) dari 5,7% menjadi 0,6% melalui keuangan digital inklusif (*Digital Inclusive Finance/DIF*)<sup>5</sup>

**Penerapan berbagai platform** dalam program inklusi keuangan digital

Sumber : <sup>1</sup> Outlook India  
<sup>2</sup> Biro Informasi Pers India  
<sup>3</sup> Institut Perdamaian Internasional  
<sup>4</sup> Bank Dunia  
<sup>5</sup> China Foundation for Poverty Allevation (CFPA)

# EKOSISTEM DIGITAL

**Transformasi Digital adalah upaya GOTONG-ROYONG seluruh aktor lintas sektor**



## Aktor Transformasi Digital



**Pemerintahan Digital**



**Ekonomi Digital**



**Masyarakat Digital**

- **Pembangunan Ekosistem Digital dilakukan terpadu secara nasional dengan mengonsolidasikan sumber daya (Pembangunan TIK tidak lagi bersifat sektoral)**
- **Ekosistem Digital Nasional mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045**





# TAHAPAN TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

Short term

Medium term

2022-2024

## 01

### Inisiasi GovTech Indonesia

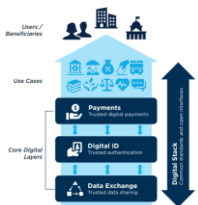
- Tahap awal keterpaduan layanan digital nasional melalui Arsitektur SPBE
- Keterpaduan layanan digital pemerintah dengan basis operasional *Digital Public Infrastructure*

2025-2029

## 02

### GovTech Indonesia

- Tahap lanjutan layanan dasar pemerintah
- Perwujudan *"Digital ID, Data Exchange, dan Portal Nasional"*
- Operasional *layanan digital Administrasi Pemerintah*



FUTURE GOVERNMENT

2030-2034

## 03

### Smart Government

- Tahap lanjutan digitalisasi layanan dasar pemerintah
- Operasional *layanan digital Administrasi Pemerintah hingga Pemda*

**Ekosistem Digital Nasional**

2035-2039

## 04

### Smart Nation

- Penerapan seluruh aspek Smart City, menjadi Smart Nation

**Digital TRUST**

2040-2045

## 05

### Smart Nation (Citizen Centric)

- Pengembangan *Smart Nation* berbasis layanan kebutuhan masyarakat (Citizen Centric)

**Citizen Centric Digital Services**

Long term

**KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA**  
melalui Ekosistem Digital Nasional mendukung pencapaian Indonesia Maju 2045

# GAGASAN STRATEGIS PENERAPAN SMART GOVERNMENT DI KOTA NUSANTARA

Strategi perpindahan menuju Kota Nusantara tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga **perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju *Smart Government*** yang mengutamakan **fleksibilitas, kolaborasi, dan agile**



## Sistem kerja, aplikasi, dan kebijakan masih bersifat silo dan instansional

- Telah melaksanakan fleksibilitas waktu dan lokasi sesuai **kebijakan instansi masing-masing**
- ASN masih memanfaatkan fasilitas kantor **sesuai instansi masing-masing**
- Didukung oleh sistem layanan digital perkantoran **sesuai instansi masing-masing**

Kondisi as-is

Visi Kota Cerdas Nusantara



## Visi Transformasi Cara Kerja Baru (UU 3 / 2022 IKN)

- Penerapan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja **kolaboratif, dan agile** (PermenPANRB 6 dan 7 Tahun 2022)
- Penggunaan fasilitas kantor bersama (**Shared Offices**)
- Digitalisasi (**Shared System**), bagian dari layanan SPBE Prioritas berupa layanan aparatur negara (Digitalisasi Manajemen ASN)



Strategi



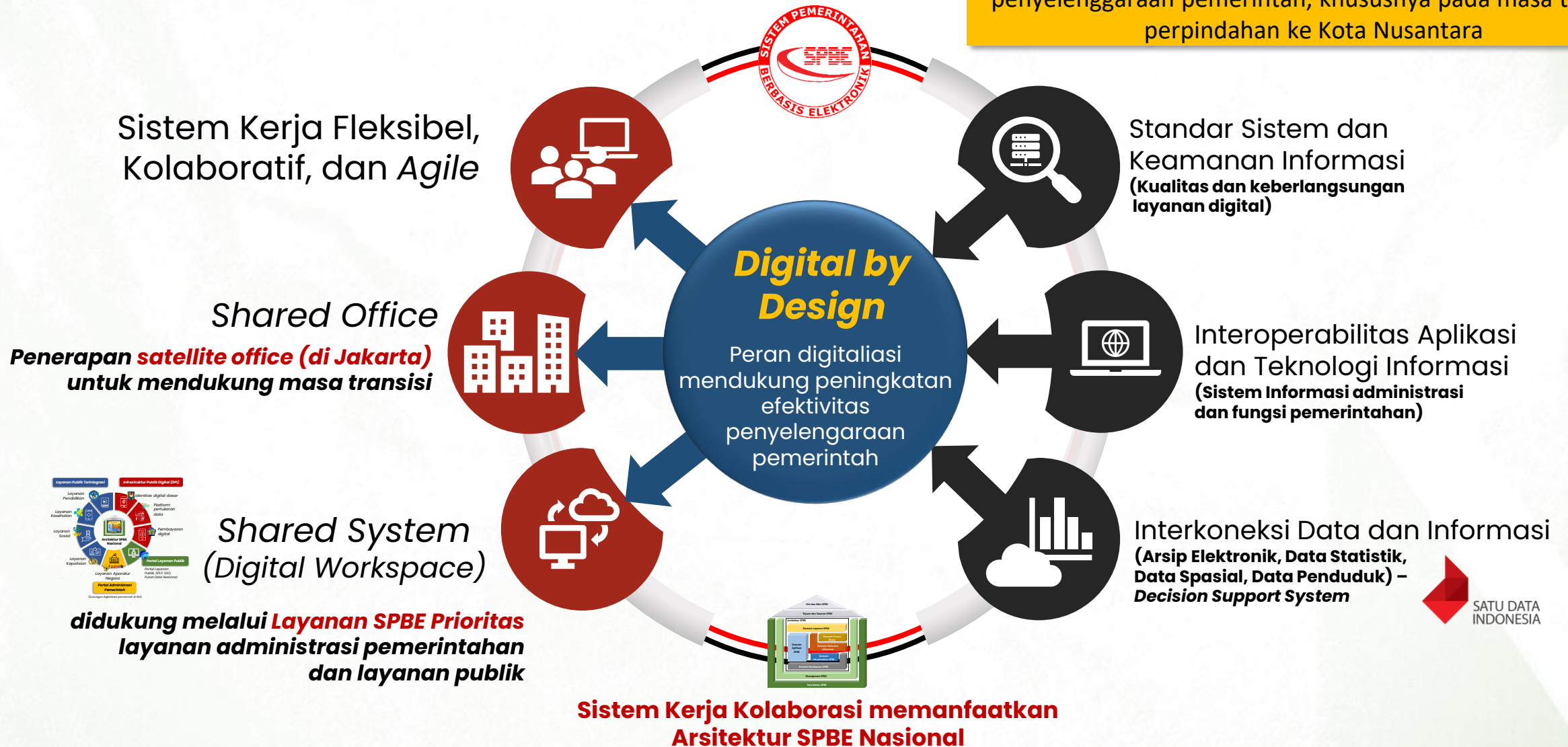
## Whole of Government Approach (Digital by Design)

- **Pengaturan Pola Kerja Kolaboratif**  
Kebijakan nasional untuk mendukung pola kerja baru, bersifat kolaboratif dan agile melalui fleksibilitas waktu dan lokasi
- **Penyediaan Fasilitas Perkantoran IKN yang mendukung Shared Offices**  
Fasilitas perkantoran dan sarana pendukung dan pemanfaatan *Satellite Office*
- **Single Digital Platform untuk Kolaborasi Kerja**  
*Digital Workspace* untuk pola kerja kolaboratif (*Smart ASN*)

# STRATEGI MENUJU SMART GOVERNMENT PADA IBU KOTA NUSANTARA

Sukses penerapan SPBE, sangat diperlukan dalam masa transisi perpindahan ke IKN

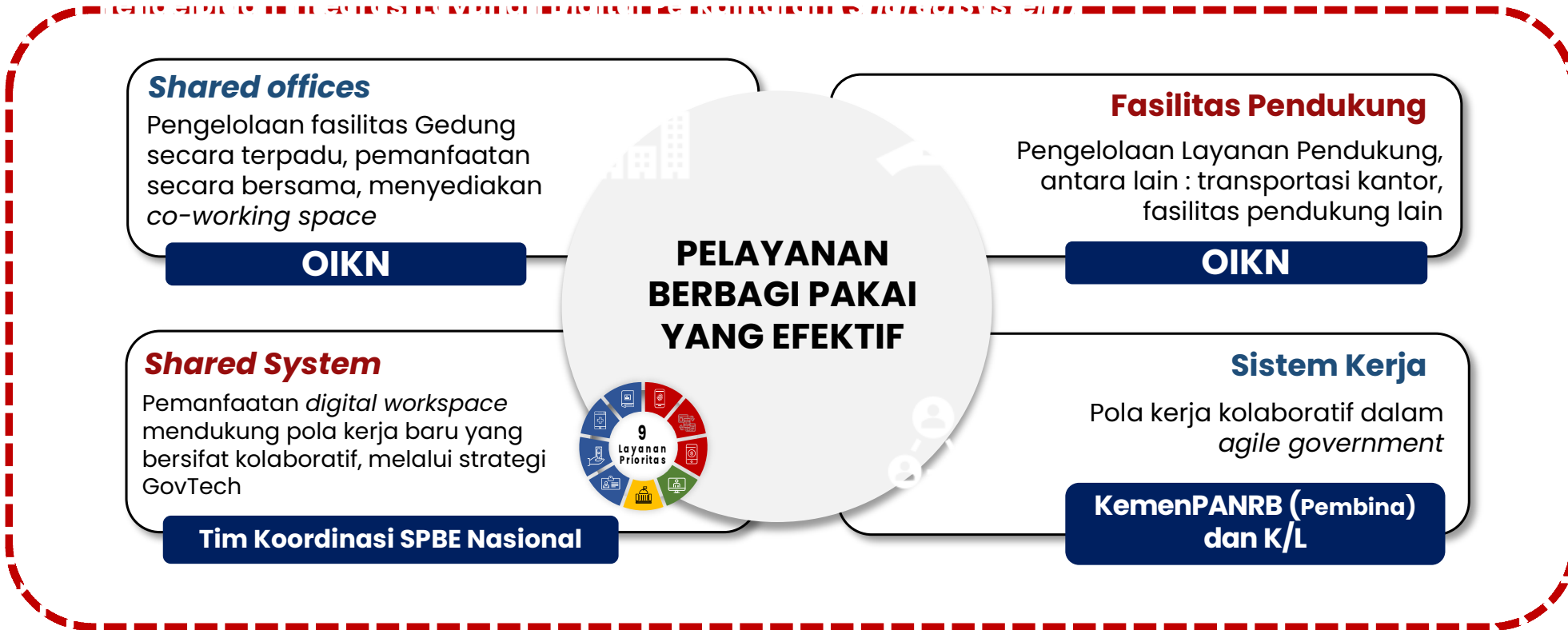
Peran sentral digitalisasi sejak awal (*Digital by Design*) yang didukung oleh strategi penyediaan layanan SPBE Prioritas melalui GovTech, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada masa transisi perpindahan ke Kota Nusantara





# KONSEP PENERAPAN *SHARED SYSTEM* DI KOTA NUSANTARA

Sinergi lintas instansi pemerintah dan dukungan OIKN dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (*Digital Workspace*) untuk memberikan fasilitas kepada penerapan *Smart Government* oleh Instansi yang beroperasi di Kota Nusantara



Fasilitasi Layanan Berbagi Pakai (Shared office dan Shared System)

Penerapan *Smart Government* pada Instansi Pemerintah di Kota Nusantara



## Lesson Learnt



Perpindahan ke Kota Sejong

- Pemanfaatan *shared office*
- Pembangunan *layanan digital pemerintah secara terpadu*, dilakukan oleh Ministry of Interior and Safety (MoIS) dengan Badan Pelaksana National Information Society Agency (NIA) - Peran GovTech di Korea



Perpindahan ke Kota Canberra

- **Pengelolaan kawasan secara terpadu** oleh The Australia Capital Territory ACT Canberra (Peran OIKN di Australia)
- Pembangunan *layanan digital pemerintah secara terpadu*, dilakukan oleh Digital Transformation Agency (DTA) - Peran GovTech di Australia



# SINERGI TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL DAN SDI PERAN DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

## Menteri PANRB

- Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional (*Chief Information Officer – CIO Nasional*)
- Mengoordinasikan **keselarasan Arsitektur SPBE** Instansi Pemerintah
- **Pembina Domain Arsitektur Proses Bisnis**
- **Pembina Domain Layanan SPBE**

Dukungan Kementerian Koordinator dalam percepatan transformasi digital



## Menteri PPN/ Bappenas

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan Nasional, sesuai Arsitektur SPBE Nasional
- **Pembina Domain Arsitektur Data dan Informasi** (Selaras dengan Kerangka Satu Data Indonesia)
- **Chief Data Officer (CDO) Nasional**



## Menteri Kominfo

- Pembina Domain Arsitektur Aplikasi
- Pembina Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
- **Chief Technology Officer (CTO) Nasional**

## Menteri Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional, sesuai Arsitektur SPBE Nasional
- **Chief Financial Officer (CFO) Nasional**



## Menteri Dalam Negeri

- Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda, melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE
- **Chief Regional Government Officer (CRGO)**

## Kepala BSSN

- Mengoordinasikan keamanan SPBE K/L/D
- Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
- Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE
- **Pembina Domain Arsitektur Keamanan SPBE**
- **Chief Information Security Officer (CISO) Nasional**

## Kepala BRIN

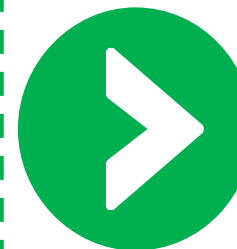
- Pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam pelaksanaan riset dan menciptakan inovasi layanan digital, seperti penggunaan kecerdasan artifisial
- **Chief Research and Innovation Officer (CRIO) Nasional**

### Sub Urusan APTIKA

1. Ruang lingkup PM menyesuaikan dengan substansi **Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** terkait tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam implementasi SPBE. Dari yang sebelumnya terdapat 14 ruang lingkup, disederhanakan menjadi 7 ruang lingkup.
2. Terkait **Keamanan Informasi dan Data/Informasi** telah dipilah dengan kewenangan BSSN dan BPS
3. Penambahan struktur pelaksana **Smart City** di daerah

### Sub Urusan IKP

1. Penyederhanaan ruang lingkup dari sebelumnya 11 ruang lingkup, menjadi 10 ruang lingkup.
2. Penambahan pengaturan terkait **standar proses bisnis PIKP** (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik)
3. Penambahan **regulasi proses berbagi pakai** media dan konten antara Pusat dan Daerah







**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**TERIMA  
KASIH**

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB